

**KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL DALAM  
PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
DI KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU**



7-02-08
Fak. Kehutanan
Il. ekol.
H
01
SICR-KH07

Oleh :

**ASMAR**  
**M 111 00 059**

**ASM**  
k.



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Hutan  
Kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu**

Nama Mahasiswa : **A S M A R**

Nomor Pokok : **M 111 00 059**

Program Studi : **Manajemen Hutan**

Skripsi Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

Pada

Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS  
NIP : 131 467 221

Ir. Abd. Rasvid Kalu, MS  
NIP : 131 477 437

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin



Ir. Budirman Bachtiar, MS  
NIP : 131 570 887

Tanggal Pengesahan :

## ABSTRAK

**Asmar (M 111 00 059), Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di bawah Bimbingan Syamsu Alam dan Abd. Rasyid Kalu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan hutan kemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive dimana menetapkan 60 KK yang berdiam di Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan hutan kemasyarakatan di Desa Ilan Batu Uru cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sumber hutan masih rendah, dan kegiatan usaha administrasi dalam pengelolaan hasil hutan yang belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan sehingga keberhasilan pembudidayaan tanaman untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat belum mampu diwujudkan dengan baik.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian selama kurang lebih dua bulan yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan pada Fakultas Kehutanan.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Ir. H. Syamsu Alam, MS** selaku dosen Pembimbing I dan Bapak **Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS** selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Sampe Paembonan** selaku penasehat akademik, Bapak **Ir. Budirman Bachtiar, MS** dan Bapak **Dr. Ir. Iswara Gautama, MS** yang telah memberikan arahan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu di Jurusan Kehutanan.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Si** selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Bapak **Dr. Ir. Yusran Yusuf, M. Si** yang tak henti-hentinya memberikan nasehat dan dorongan semangat.
4. Staf pengajar dan karyawan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. Kelompok tani di sekitar Pengembangan HKm di Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.

6. Rekan-rekan seperjuangan, Moch. Imran Zainal, Muhatzir, Akbar, Isran Jaya, L.Sabir, Copik. Terus Berjuang.
7. Rekan-rekanku angkatan 2000 : Arman, Rudi Ashadi, Reza, Duwi Saputro, Endah, Astrid, DJ, Steed Dhani, Hamzah, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya.
8. Rekan-rekanku Angkatan 2002, Angkatan 2003, Angkatan 2004, dan semua rimbawan.

Secara khusus terima kasih dan sembah sujudku kepada kedua orang tuaku

**H. Sayuti Kampe** dan **Hj. Sitti Nurhayati** dan kakak-kakakku **Akram Sayuti**, **Akbar Sayuti, SKM**, dan **Anshar, S.STP, M. Si** dan teman sejawatku **Pak Agus**, **Ir. Muh. Tang, Mustain, ST, dkk** serta seluruh kerabat keluargaku semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan diluar batas kemampuan saya, akan tetapi mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Desember 2007

*Penulis*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Kegunaan .....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembangunan Kehutanan .....	5
B. Hutan Kemasyarakatan.....	7
C. Konsep Keterlibatan.....	10
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan HKm.....	23
E. Kerangka Berfikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat .....	33
B. Teknik Pengambilan & Sampel.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Analisis Data... ..	34
E. Definisi Operasional Variabel.....	35

IV.	KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A.	Kondisi Geografis.....	37
B.	Keadaan Demografi.....	39
C.	Pola Penggunaan Lahan.....	41
D.	Gambaran Pelaksanaan HKM.....	42
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Hasil.....	46
B.	Pembahasan.....	56
VI.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	58
B.	Saran .....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b><u>Teks</u></b>	<b>Halaman</b>
1.	Luas Desa / Kelurahan di Kecamatan Walenrang.....	38
2.	Banyaknya Penduduk, RT dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Walenrang.....	39
3.	Banyaknya Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Walenrang.....	40



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b><u>Teks</u></b>	<b>Halaman</b>
1.	Kerangka Berpikir.....	32

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang merupakan negara tropis mempunyai hutan yang luas dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hutan bagi bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak terhingga manfaatnya sebagai modal pembangunan nasional. Untuk itu hutan harus diurus, diolah, dilindungi dengan kelestariannya, dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Krisis multi dimensional yang melanda Bangsa Indonesia dewasa ini tidak menjadi rintangan atau hambatan pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung disegala bidang dan sektor, meskipun pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kelangsungan pembangunan nasional tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata dan adil terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu sektor pembangunan yang tetap mendapat prioritas adalah Kehutanan. Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998-2003 ditegaskan bahwa pembangunan Kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan fungsi serta mutu lingkungan hidup dan peningkatan fungsi sosial hutan.

Pembangunan Kehutanan yang berhasil berarti mempertahankan keanekaragaman hayati, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan devisa dan pendapatan negara/daerah, mendukung pembangunan wilayah dan daerah serta dapat memberdayakan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan.

Selama lebih dari tiga dekade, kehutanan telah menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional melalui eksploitasi hutan alam yang digerakkan oleh usaha dan industri kehutanan berskala besar, namun kenyataannya kebijakan tersebut telah menumbuhkan degradasi hutan yang salah satunya sebagai akibat kurangnya menggali partisipasi masyarakat.

Saat ini pemerintah menyadari laju deforestasi sudah demikian besar. Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas, yaitu pemberantasan *illegal logging*, penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi dan konservasi sumberdayahutan, restrukturisasi sektor kehutanan, dan penguatan desentralisasi bidang kehutanan. Implementasi kebijakan ini antara lain melalui program *social forestry* yang dijiwai semangat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kehutanan.

Berdasarkan data-data yang diperoleh pada Dinas Kehutanan di Kabupaten Luwu, kondisi hutan terlihat kualitasnya semakin menurun dengan semakin bertambahnya lahan kritis. Hasil inventarisasi dan identifikasi lahan kritis di Kabupaten Luwu menunjukkan luas lahan kritis telah mencapai 125.197,17 ha, yang terdiri dari lahan kritis dalam kawasan seluas 63.968,98 ha, meliputi lahan sangat kritis, kritis dan agak kritis, dan di luar kawasan seluas, 61.228,10 ha terdiri

dari lahan sangat kritis, kritis dan agak kritis. Sedangkan potensial untuk kritis masing-masing di dalam kawasan hutan adalah 13.783 ha, dan di luar kawasan hutan adalah 39.244,92 ha.

Dari pengamatan diketahui bahwa semakin meningkatnya jumlah lahan kritis di Kabupaten Luwu disebabkan karena keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan belum optimal.

Salah satu bentuk pendekatan yang diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kehutanan adalah Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (*Community Forest Development*). Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diatur melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 622/Kpts-II/95, 677/Kpts-IV/1998 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001. di mana diatur bahwa pembangunan Hutan Kemasyarakatan bertujuan selain untuk meningkatkan kelestarian hutan dan lingkungan hidup juga meningkatkan mutu dan produktivitas hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Semakin bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Luwu mengindikasikan masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam pembangunan HKm sehingga kehilangan sumber-sumber pangan dan pendapatan yang berdampak pada peminggiran baik secara ekonomi, budaya maupun sosial. Akibatnya pembangunan hutan di Kabupaten Luwu tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial dan ketidakperdulian masyarakat lokal terhadap hutan dan lingkungannya. Hutan dirusak dan terancam kelestariannya yang ditujukan

dengan semakin meluasnya lahan kritis di dalam maupun di luar kawasan hutan sehingga berdampak pada timbulnya banjir, longsor dan musim kemarau yang berkepanjangan.

### **B. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan masyarakat lokal terhadap pembangunan hutan kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan hutan kemasyarakatan.

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pembangunan Kehutanan

Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan dalam hal penerapan strategi maupun kebijakan, karena adanya perbedaan kondisi geografis dan kondisi masyarakat bangsa yang bersangkutan. Meskipun demikian pembangunan yang dilaksanakan secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Menurut Todaro (2000) pembangunan adalah proses multi dimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan *absolut*.

Denis Goulet (Todaro, 2000) mengemukakan adanya tiga komponen dasar atau nilai-nilai yang seharusnya terdapat dalam konsep dan petunjuk praktis untuk memahami arti hakikat pembangunan yaitu :

1. Menunjang kelangsungan hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.
2. Harga diri, kemampuan untuk menjadi seorang manusia.
3. Kemerdekaan dari penjajah dan perbudakan dan kemampuan untuk memilih.

Bryant dan White (1987) mengemukakan agar pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Pembangunan sebagai salah satu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Untuk itu implikasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas (*capacity*) manusia dalam menentukan sendiri masa depannya.
2. Pembangunan sebagai suatu proses yang menitik beratkan aspek keadilan (*equity*) dalam distribusi pendapatan dan kesempatan untuk menikmati hasil.
3. Pembangunan sebagai proses pertumbuhan kekuatan (*empowerment*) bagian segenap masyarakat untuk bertindak dalam skala yang lebih besar.
4. Pembangunan harus mempertimbangkan kelangsungannya (*sustainability*) dengan memberi perhatian yang besar terhadap keterbatasan daya dukung lingkungan.
5. Pembangunan merupakan proses untuk menciptakan saling ketergantungan (*interdependency*) bukannya ketergantungan yang bersifat satu arah.

Berdasarkan paparan di atas, maka pelaksanaan pembangunan komunitas pada skala luas hanya menghasilkan tidak lebih dari seperangkat program dan target baru yang dirumuskan dari pusat dengan pelaksanaan struktur-struktur birokrasi yang konvensional dan tidak dianggap terhadap *preferensi* atau kebutuhan-kebutuhan rakyat setempat.

## **B. Hutan kemasyarakatan**

Tjokrowinoto (1993) mengemukakan bahwa pembangunan kehutanan yang sentralistik dan ekonomis tidak jarang dapat menimbulkan deforestasi dan degradasi ekologis yang mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan itu baik sebab maupun akibat dari akselerasi erosi hutan yang merupakan kekayaan dasar utama sangat berpengaruh terhadap masyarakat sebagai pemanfaat utama sumber bio massa dan pengelola ekonomi keluarga seringkali menentukan, baik kelestarian maupun kerusakan hutan.

Hutan kemasyarakatan adalah bentuk perhutanan sosial yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan. Menurut SK Menteri Kehutanan Nomor : 622/Kpts-II/95, kawasan hutan yang dapat dijadikan areal HKm dikembangkan adalah kawasan hutan produksi dan hutan lindung (yang tidak dibebani PPH dan HPHTI). Pengembangan HKm berdasarkan pada visi tidak hanya sekedar memberikan alternatif pada pemberian kesempatan kepada masyarakat lokal. Sumber daya hutan ini dimanfaatkan secara bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan senantiasa memperhatikan sumber daya alam setempat.

HKm merupakan suatu upaya pengelolaan hutan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara hutan dan masyarakat sekitarnya. Menurut Arnold (1992) munculnya HKM yang melibatkan masyarakat desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan, dibutuhkan suatu pemahaman baru mengenai beberapa kepentingan yang menghubungkan masyarakat dengan hutan. HKm berasal dari usaha pekerjaan hutan untuk mengadakan hubungan baru dengan masyarakat setempat, dan untuk



menanggapi keinginan masyarakat setempat yang erat kaitannya dengan pertumbuhan populasi masyarakat desa.

Ide HKM menurut Zain (1997) berasal dari beberapa negara di Eropa dan negara tetangga dalam penerapan *social forestry*. Di Indonesia disebut sebagai program perhutanan sosial dengan model *agroforestry*, selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam HKM.

Noronha (1982) tidak membedakan antara *social forestry* dengan *community forestry*. *Social forestry* berbeda dalam beberapa aspek dengan kehutanan yang bersifat komersil, yaitu :

1. *Social forestry* pada umumnya mencakup pemanfaatan hutan non kayu
2. *Community forestry* melibatkan langsung pihak penerima manfaat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan *social forestry* diperlukan perubahan sikap petugas kehutanan. Petugas kehutanan bukan lagi petugas penjaga hutan terhadap gangguan masyarakat, melainkan harus melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan budidaya pohon-pohon, baik secara perorangan maupun kelompok.

Hutan kemasyarakatan telah diartikan dalam berbagai bentuk, sebagian besar definisi ditujukan pada pengawasan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat desa yang menggunakan hutan untuk tujuan tersebut, dan sebagai penyatuan bagian sub system dari system usaha tani. Dalam hal ini masyarakat yang melaksanakan tugas mengelola hutan perlu mendapat bantuan teknis dan bimbingan yang diperlukan dari ahli kehutanan. Dalam Lei and Sheng (1993) dinyatakan bahwa HKM

dimulai sebagai usaha strategi untuk mengelola hutan di bawah tekanan penduduk yang tinggi dan sumberdaya lahan yang terbatas. Usaha-usaha melalui berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan HKM melalui berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan HKM untuk memenuhi berbagai permintaan masyarakat setempat dan masyarakat luas b, serta untuk menyelesaikan permasalahan konflik antara berbagai keperluan yang berbeda.

Yunus dan Alam (2001) mengemukakan bahwa pembangunan HKM harus didasari prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip berkeadilan. Agar masyarakat lokal yang tinggal dalam dan sekitar hutan mendapat kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk mengusahakan aset produksi nasional yang berupa sumber daya hutan. Jiwa pembangunan ini perlu mendapat dukungan melalui perwujudan bentuk-bentuk desentralisasi pengambilan keputusan.
2. Prinsip partisipatif. Masyarakat laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan dan kepercayaan yang sama untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pelestarian sumberdaya alam setempat.
3. Prinsip kemandirian. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk berswakarsa, berswadaya, berswakelola, serta tidak terlalu memerlukan pembinaan.
4. Prinsip desentralisasi. Pemerintah daerah dengan otonominya memberikan fasilitas dan mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan tidak

memberdakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam mengelola Hutan dengan segala aspeknya.

5. Prinsip kemitraan. Pengembangan bentuk hubungan antara masyarakat lokal/setempat dengan pihak luar harus dilandaskan suasana kemitraan yang sejajar.
6. Prinsip berkelanjutan. Terjaminnya kelangsungan kegiatan pembangunan oleh masyarakat untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
7. Prinsip pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pengelolaan hutan harus mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan yang diambil kepada masyarakat baik oleh pemerintah maupun masyarakat pengelola hutan.
8. Prinsip ekonomi. Kehutanan masyarakat harus mampu memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan negara sehingga tercipta kesejahteraan bersama.
9. Prinsip interaktif. Pembangunan hutan kemasyarakatan harus terintegrasi dan sinergi dengan sektor lain.

### **C. Konsep Keterlibatan**

Mishra dan Slamet (1984) mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses peran serta atau keterlibatan dan harus dipahami sebagai proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan berbagai aspek dalam masyarakat dengan memberi batasan mengenai konsep keterlibatan bahwa manfaat pembangunan yang dapat dinikmati pelaku keterlibatan sangat tergantung pada besar dan mutu sumbangannya dalam pembangunan dan juga sangat tergantung pada tingkat kemampuan serta

kesempatan yang diperolehnya untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Untuk mencapai perubahan yang mengarah kepada perbaikan diperlukan suatu strategi sebagai pola penentuan serangkaian tujuan-tujuan dari perubahan yang diinginkan dengan keterlibatan sosial. Strategi itu mencakup konsepsi keterlibatan tentang masukan materi perubahan (inovasi dengan dana dan tenaga yang dianggap paling efektif dan efisien dan dituangkan dalam system untuk menimbulkan perubahan kearah perbaikan). Hal tersebut mencakup obyek keterlibatan yang dapat berbentuk menyeluruh seperti program yang sederhana.

Cohen dan Uphoff (1984) mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat secara sukarela dalam seluruh tahapan proses pembangunan, bukan melalui para wakilnya.

Keterlibatan dalam pembangunan kehutanan merupakan sebuah proses dimana sebagai stakeholder terlibat, mempengaruhi, mengendalikan pembangunan kehutanan ditempat mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga turut serta secara aktif dalam memprakarsai perbaikan kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumber daya dan penggunaannya. Dalam pengertian ini, proses perubahan atau pembangunan akan ditentukan oleh aktivitas dan kreativitas masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah atau organisasi lain seperti KSM dan LSM. Menurut Tikson (2001) merumuskan bahwa keterlibatan memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Keterlibatan secara aktif masyarakat didalam setiap langkah siklus proyek, mulai dari pembuatan keputusan, perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.



- b. Penggalangan berbagai kekuatan masyarakat (tenaga, pikiran dan sumber daya) dan penggunaannya dalam pembangunan sehingga peranan mereka menjadi lebih penting.
- c. Menggunakan beberapa metode, prosedur teknik-teknik tertentu untuk memfasilitas dan menggalakan kegiatan keterlibatan.
- d. Adanya pembuatan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa terlalu banyak dibantu oleh pihak luar.
- e. Institusional kemandirian dalam menentukan nasib dan pertumbuhan masyarakat kearah yang lebih baik dan *egiliter* artinya, keterlibatan *stakeholder* akan menjadi rutin dalam setiap kegiatan manajemen dan pembangunan kota.

Pada umumnya setiap pembangunan yang dilakukan merupakan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara sedang pemerintah sebagai fasilitator. Dengan demikian bahwa setiap pembangunan diperlukan keterlibatan masyarakat, baik dalam mengambil keputusan ataupun gagasan yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan tersebut. Keterlibatan masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari interaksi sosial atas adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok berdasarkan potensi atau kekuatan masing-masing.

Secara operasional pengertian keterlibatan atau peran serta adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan yang memadai, turut serta memuluskan tujuan dengan rasa tanggungjawab yang dijiwai oleh rasa turut

memiliki, dapat pula diartikan kesadaran keikutsertaan perghuni atau warga dalam melaksanakan kegiatan akan menimbulkan pula rasa tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga merosotnya prasarana permukiman. Untuk memperoleh gambaran mengenai keterlibatan maka akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli.

Tjokrowinoto.M (1993) mengemukakan bahwa keterlibatan adalah keikutsertaan masyarakat atau rakyat sesuai mekanisme proses politik dalam salah satu negara, turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Laloasa (2001) memberi pengertian keterlibatan masyarakat sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar yang mengikut sertakan baik jiwa raga maupun harta bendanya, untuk mendukung terlaksananya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Rukmana Nana. DW (1993) alasan efektivitas dan efisiensi keterlibatan masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. keterlibatan masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas
2. keterlibatan masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan pada kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan, rencana program dan kebijaksanaan yang lebih realistik. Selain itu memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia, mampu

menyumbangkan sumber daya mereka seperti uang, tenaga bagi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan

3. masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

Berdasarkan paparan di atas, maka keterlibatan adalah merupakan salah satu cara untuk memotivasi yang mempunyai ciri khas yang lain daripada yang lain. Hal ini disebabkan peningkatan keterlibatan tidak ditekankan pada segi psikologis daripada segi materi, dimana dengan jalan melibatkan seseorang didalamnya, maka orang tersebut akan merasa ikut bertanggungjawab.

Adapun cara-cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menurut Nitisemito (1982) antara lain :

1. mengikut sertakan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan
2. menjelaskan tentang maksud tujuan keputusan dan perencanaan yang dikeluarkan
3. meminta tanggungjawab dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang dikeluarkan
4. meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan
5. memberikan kesempatan untuk ikut memiliki
6. meningkatkan pendelegasian wewenang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan hutan kemasyarakatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, perlu didukung oleh faktor :

### 1. Perencanaan

Ada beberapa definisi perencanaan yang perumusannya berbeda-beda dengan yang lain. Cunningham (Made Fidarta, 1997) mengemukakan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi dan asumsi-sumnsi untuk masa yang akan datang untuk tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian.

Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh Cunningham di atas menekankan kepada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu untuk kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Apa wujud yang akan datang dan bagaimana usaha untuk mencapainya adalah merupakan perencanaan.

Definisi perencanaan dikemukakan oleh Made Fidarta (1997). bahwa perencanaan ialah hubungan antara apa adanya sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program dan alokasi sumber. Bagaimana seharusnya adalah mengacu pada masa yang akan datang.

Pengertian perencanaan di atas nampak menerkankan pada kepada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan pada masa yang akan datang yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan, ialah menghilangkan jarak antara keadaan sekarang dengan keadaan mendatang yang diinginkan.



Perencanaan adalah fungsi pertama dan utama manajemen. Dengan perencanaan orang dapat mengetahui apa, mengapa, dimana kapan, siapa dan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan. Panglykim dan Hazil (1977) mengemukakan perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan harus didasarkan pada kenyataan, pada data dan keterangan yang kongrit ; tidak pada bagaimana maunya kita, keinginan kita dan sebagaimana.
2. Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imaginasi dan kesanggupan melihat ke depan.
3. Perencanaan mengenai zaman datang dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan jika ada rintangan tiba-tiba muncul atau kesulitan-kesulitan mengganggu lancarnya usaha.

Definisi perencanaan yang telah dikemukakan di atas memperlihatkan rumusan dan tekanan yang berbeda dimana satu mencari wujud yang akan datang serta usaha untuk mencapainya dan yang lain menghilangkan kesenjangan antara keadaan seharusnya dengan keadaan masa mendatang, dan yang satu lagi mengubah keadaan agar sejalan dengan keadaan lingkungan yang juga berubah.

Pada hakikatnya ketiga pengertian perencanaan yang telah dikemukakan di atas memberi makna sama, yaitu sama-sama ingin mencari dan mencapai wujud yang akan datang, tetapi definisi yang pertama dan kedua tidak menyatakan secara eksplisit, bawa wujud yang dicari itu akibat dari terjadinya perubahan, termasuk perubahan dalam cita-cita.

Perencanaan pada dasarnya adalah merupakan keseluruhan aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya pengendalian dan pengarahan sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Soedjadi (1989) mengenai perencanaan mengemukakan bahwa proses kegiatan dari seorang pimpinan (manajer) yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama orang-orang lain sebagai sumber tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia untuk itu dengan cara yang setepat-tepatnya.

Apabila mencermati pengertian perencanaan di atas, maka dalam suatu perencanaan yang penting diperhatikan adalah :

- a. Untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan memperhatikan sumber-sumber daya dan alternatif yang dipandang terbaik, dalam hal ini yang meminta perhatian adalah perlunya koordinasi antar berbagai kegiatan, penggunaan sumber-sumber dan penerapan serta penyusunan skala prioritas.
- b. Penterjemahan rencana dalam program-program kegiatan yang kongkret.
- c. Penetapan jangka waktu pencapaian tujuan/sasaran.

## **2. Pelaksanaan**

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata "Kelola" (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai

tujuan. Banyak ahli yang telah memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda dalam pengkajiannya, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Istilah lain yang sinonim dengan pengelolaan adalah pengurusan, pengarahan, dan metode manajemen adalah berasal dari kata kata Inggris "*governance*" (Nugroho, 2003). Secara etimologi, kata *governance* berasal dari bahasa Latin, *gubernare*, yang diserap dalam bahasa Inggris menjadi *govern* yang di artikan sebagai *to rule with authority* (menyetir, mengendalikan, mengarahkan, memerintah dengan kewenangan). Kata sifat dari *govern* adalah *governance* yang berarti *method of management* (metode manajemen), *system of regulation* (sistem pengaturan), atau *the sum of many ways that individuals and institutions, public and private, manage their common affairs* (keseluruhan dari cara-cara dimana individu-individu dan institusi-institusi, baik privat maupun publik, mengelola urusan-urusan bersamanya. Pelaksananya disebut *government* (pemerintahan), yang selain mempunyai arti sebagai *the action of governing*, juga mempunyai arti sempit sebagai *the action of ruling and directing the affair of a state* (pelaksanaan pengaturan dan pengarahan-pengarahan urusan-urusan negara).

Soekanto (1986) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses tercapainya tujuan. Hal yang sama dikemukakan oleh Hamalik (1993) bahwa pengelolaan adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas peranan pemakai, ketenagaan, organisasi pelaksana,

pengendalian dan penilaian yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaruh-mempengaruhi, ketergantungan dan saling terobos satu sama lain dalam rangka penyediaan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Meskipun beberapa pendapat tentang pengelolaan yang telah dikemukakan di atas, memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, namun belum memberikan penekanan yang relevan dengan masalah yang diteliti, yakni hanya menekankan pada proses manajemen dan administrasi dalam suatu organisasi tanpa menekankan pada aspek pemberdayaan atau pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia.

Prayudi (1990) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Pendapat Prayudi tersebut diperkuat oleh Balderton (dalam Westra, 1983), yang mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu, penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Moekijat (2000) dinyatakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dari ketiga pendapat di atas, memiliki persamaan pengertian tentang pengelolaan, dimana ketiga pendapat tersebut menekankan bahwa pengertian pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan

pengawasan, serta pemanfaatan berbagai sumber daya, termasuk sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan demikian pengertian pengelolaan yang dikemukakan ketiga ahli tersebut memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Pengendalian

Masalah pengendalian biasanya disalah artikan dengan pengertian pengawasan, bahkan keduanya diartikan sama dengan *controlling*. Untuk itu perlu ada pembatasan antara pengendalian dan pengawasan.

Pada dasarnya pengendalian identik dengan *controlling* dan pengawasan identik dengan *supervision*. Pada dasarnya *controlling* adalah keseluruhan dari pada kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Suwignjo (1986) mengemukakan bahwa pengendalian mengandung arti suatu pekerjaan membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, peraturan, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pengertian pengendalian di atas, maka kegiatan pengendalian tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Seperangkat kriteria yang harus ditetapkan sebelumnya guna mengukur penyelenggaraan.
- b. Suatu sistem yang dapat membuat kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan menjadi nampak

Secara konkrit pelaksanaan pengendalian biasanya dimuat di dalam buku pedoman kerja. Di samping itu diperlukan suatu sistem pelaporan (*reporting*) yang teratur oleh bawahan kepada pimpinan. Berdasarkan hal di atas, maka unsur-unsur pokok dari pengendalian menurut Suwignjo (1986) adalah sebagai berikut :

1. Penentuan standar pengendalian, standar ditetapkan dengan mengingat rencana yang telah ditetapkan.
2. pengukuran, perbandingan hasil kerja nyata dengan standar yang telah ditentukan.
3. Evaluasi atau penilaian untuk menentukan elah atau gap antara hasil-hasil yang nyata dengan hasil-hasil yang nyata dengan hasil-hasil diharapkan menurut standar/rencana.
4. Tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan, baik sesudah pekerjaan maupun sementara pekerjaan berlangsung, hal mana tergantung pada penyimpangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengendalian pada dasarnya adalah rangkaian dari pada pelaksanaan pengawasan, yang merupakan tindak lanjut, karena setiap prestasi diukur dan dinilai, dan juga diperbandingkan dengan standar-standar yang berlaku dalam organisasi. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, dan penyimpangan, segera akan dilakukan revisi dan koreksi.

Untuk berhasilnya pelaksanaan pengendalian, dapat digunakan metode pengendalian yang tepat dan sesuai dengan keadaan (obyek) kegiatan yang akan dikendalikan. Adapun metode pengendalian yang dapat digunakan ialah:

### 1. Pengendalian Langsung (*direct control*)

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah apabila pimpinan suatu unit organisasi mengadakan sendiri pengendalian terhadap kegiatan/proyek yang sedang dijalankan. Pengendalian ini dapat berupa :

- a. Inspeksi di lapangan
- b. Pengamatan di lapangan (*on the spot observation*)
- c. Pelaporan langsung (*on the spot report*).

### 2. Pengendalian Tidak langsung (*indirect control*)

Pengendalian ini dilakukan dengan jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasannya. Laporan dapat berbentuk tertulis atau lisan. Pengendalian tidak langsung ini mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu bahwa bawahan ada kecenderungan menyampaikan laporan yang baik-baik saja dan kurang memberikan laporan yang sesuai dengan kenyataan dan keadaan. Dengan laporan yang demikian, berakibat pengambilan keputusan keliru, sehingga tindakan turun tangan apabila ada penyimpangan tidak akan membantu mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan sesuai rencana.

**D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat Lokal**  
**dalam Pembangunan HKM**

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan HKM pada dasarnya dipengaruhi dua faktor penting yaitu :

**1. Faktor Masyarakat**

Sarbidi (1999) dalam penelitiannya menyatakan bahwa parameter-parameter yang dianggap dominan yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan HKM antara lain :

1. aspek lingkungan fisik seperti lokasi permukiman dan prasarana yang ada
2. aspek lingkungan sosial budaya seperti kondisi keterkaitan sosial/ hidup penduduk, pendidikan yang rendah
3. aspek pengaturan pemerintah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijaksanaan serta pengawasan.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan HKM pada pokoknya adalah:

1. Kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
2. Suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.



3. Pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak social
4. Keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri
5. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka

Pada hakekatnya bahwa jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan perkotaan, pembangunan diperkirakan akan berlangsung lebih efektif dan efisien

Rukmana Nana D.W (1993) Mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah sumbangan sumber daya yang terbagi atas :

1. Keterlibatan bersifat nyata dan terukur dalam bentuk uang, tanah dan tenaga
2. keterlibatan bersifat tidak dapat diukur/ tak nampak yang akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi yang lebih besar yaitu dalam bentuk pengetahuan, kreativitas, keterampilan dan organisasi

Apabila masyarakat tidak diberi kesempatan menyumbangkan sumber daya yang tidak nampak ini, mereka akan kehilangan motivasi, kemauan dan aniusiasme untuk mengembangkan sumber daya lain yang tampak dan terukur.

Ndraha (1990) mengemukakan sejumlah tahapan dalam proses keterlibatan masyarakat demi kelancaran pembangunan yang ada maka dibagi dalam enam tahap atau fase yaitu :

1. keterlibatan dalam memberi dan menerima dan memberi informasi yang diterima
2. keterlibatan dalam memberi tanggapan terhadap informasi yang diterima
3. keterlibatan dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan
4. keterlibatan dalam pelaksanaan operasional pembangunan
5. keterlibatan dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan
6. keterlibatan dalam menilai hasil pembangunan

Keterlibatan masyarakat tidak dapat berjalan tanpa adanya dorongan dari pihak-pihak tertentu. Menurut Ndraha (1987:123) bahwa faktor pendorong keterlibatan dan pada keadaan sebaliknya dianggap sebagai faktor penghambat.

- a. Pola keterlibatan secara luas ditentukan oleh lingkungan sosial. Pada beberapa masyarakat setempat, organisasi atau keluarga tentu keterlibatan dalam berbagai cara sudah merupakan fungsi kebudayaannya, sebab itu orang belajar untuk berketerlibatan sebagai bagian dari awal perkembangan. Dalam keadaan demikian secara relatif akan lebih mudah melibatkan orang dalam proyek



- b. Konsep lainnya adalah bahwa orang berketerlibatan diluar rasa kewajiban. Ada orang yang sudah berkembang tinggi rasa berkewajiban umum atau rasa tanggungjawab sebagai warga masyarakat.
- c. Orang berketerlibatan bilamana mereka sanggup, mampu dan percaya terhadap diri sendiri biasanya timbul dari akses terhadap informasi serta kesempatan untuk latihan
- d. Ekspresi diri dari aktualisasi juga merupakan bentuk dasar untuk berketerlibatan keputusan dalam jenis pekerjaan tentu kemenangan yang terwujud dan diperoleh pada masa yang akan datang, juga merupakan motivasi untuk berketerlibatan, khususnya bagi mereka yang terlibat sebagai pemimpin.
- e. Adanya kesempatan untuk memperkaya diri atau memperbaiki keadaannya juga mendorong untuk berketerlibatan
- f. Adanya interest pribadi tertentu, misalnya berupa keuntungan-keuntungan sosial, ekonomis dan politis juga menjadi faktor pendorong keterlibatan

## **2. Faktor Kebijakan**

Dalam arti yang luas, menurut Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa kebijakan (policy) mengandung dua aspek pokok, yaitu :

1. Policy merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika

kehidupan masyarakat dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.

2. Policy adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan dengan kebijakan. Jika terjadi beberapa pihak yang bersama-sama ikut menentukan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi dalam perjalannya ada pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak rasional, maka diambil suatu tindakan yang berupa kebijakan yang dapat mendorong agar diciptakan situasi yang rasional. Kebijakan semacam ini merupakan dorongan atau *incentive* bagi pihak yang sudah sepakat menentukan tujuan bersama untuk bekerja secara rasional.

Dari dua aspek pokok tersebut disimpulkan bahwa : kebijakan di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, di lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik yang dapat menimbulkan insentif (pengaruh).

Menurut Prayudi (1990) policy dapat dipandang sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika atau dapat dikatakan kebijakan atau policy adalah suatu keputusan yang teguh yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa kebijaksanaan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan lembaga yang bersangkutan.

Kebijakan (*business policy*) itu bertingkat-tingkat dan tersusun secara vertikal, struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum (misalnya "*codes of ethics and profession conduct, lines of business*") sampai pada kebijakan yang bersifat praktikal dan konkret (misalnya "*prohibition of drinking on the job*"). Enam tingkat berturut-turut kebijakan menurut Atmosudirdjo (1976) adalah *major policies, secondary policies, functional policies, minor policies, procedures and standard operating plans, dan rules*. Struktur kebijakan disektor publik mutatis-mutandis demikian juga, tersusun sesuai dengan hierarki kekuasaan (kompetensi) di dalam organisasi publik yang bersangkutan.

### E. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan HKM, terdapat beberapa tahapan keterlibatan, seperti yang dikemukakan oleh Stephen (1992) serta Cohen dan Uphoff (1977) yaitu: (1) Keterlibatan pada tahap perencanaan; (2) keterlibatan pada tahap pelaksanaan; (3) keterlibatan pada tahap pemanfaatan; dan (4) keterlibatan pada tahap penilaian hasil pembangunan.

#### **1. Keterlibatan pada tahap perencanaan**

Keterlibatan pada tahap perencanaan menyangkut keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Keputusan tersebut menurut Cohen dan Uphoff, Mishra dan Slamet (1984) dapat dibedakan atas keputusan dasar, keputusan yang sementara berlangsung dan keputusan operasional.

Keputusan dasar berkenaan dengan tahap identifikasi proyek (tahap persiapan), keputusan yang sementara berlangsung berkenaan dengan lokasi proyek sesuai kebutuhan dan prioritas, redesain proyek, dan penetapan lokasi proyek sesuai perkembangan lokal, keputusan operasional berkenaan dengan penetapan kriteria pelaksanaan, pemilihan pemimpin kegiatan tertentu, penentuan cara-cara pelaksanaan secara teknis dan kegiatan-kegiatan teknis lainnya.

## 2. Keterlibatan pada tahap pelaksanaan

Ada beberapa cara masyarakat desa untuk terlibat dalam implementasi kegiatan pembangunan. Menurut mishra (1984) serta Cohen dan Uphoff (1977) cara-cara tersebut adalah:

- a. Keterlibatan melalui kontribusi sumber-sumber yang dibutuhkan oleh program pembangunan, yang dapat berupa penyediaan tenaga kerja, uang, material/benda, dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Keterlibatan melalui usaha-usaha administrasi dan koordinasi, yaitu berupa pendataan kegiatan dan kemajuannya, melakukan kontak langsung dengan unsur-unsur terkait, ataupun menjadi anggota dewan penasehat atau pengambil keputusan.

## 3. Keterlibatan pada tahap pemanfaatan

Menurut Jahi (1988) apabila dalam keterlibatan itu memberikan manfaat dan dengan kemanfaatan itu dapat memenuhi keperluan-keperluan masyarakat setempat, maka hal ini akan menjadi faktor pendorong timbulnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Berbagai macam manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari keterlibatannya dalam pembangunan, dapat berbentuk material, sosial dan personal. Manfaat material menyangkut barang-barang pribadi, misalnya konsumsi, pendapatan dan asset. Peningkatan konsumsi dapat terjadi apabila diikuti dengan peningkatan hasil (pendapatan). Peningkatan pendapatan dapat tercipta bila terjadi peningkatan produksi (pendapatan). Peningkatan pendapatan

dapat tercipta bila terjadi peningkatan produksi (asset) dan peningkatan asset dapat terjadi jika terjadi peningkatan pemilikan lahan dan lain-lain.

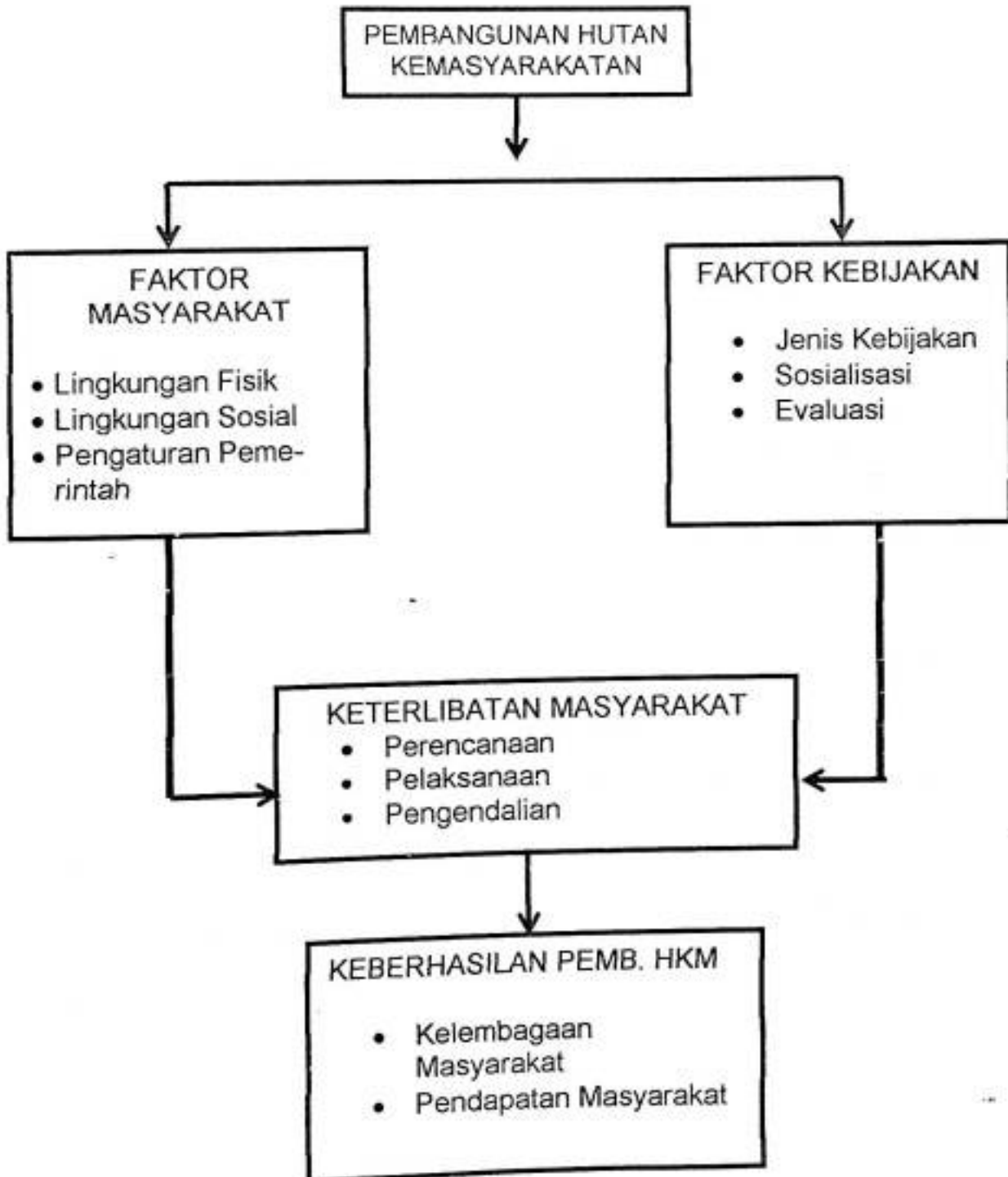
#### **4. Keterlibatan pada tahap penilaian hasil pembangunan**

Penilaian hasil biasanya dilakukan melalui kegiatan utama, yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan adalah pengumpulan informasi secara terus menerus dalam input-input program, sasaran-sasaran, kondisi-kondisi dan aktivitas-aktivitas program serta dampaknya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program.



Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pikir penelitian dikemukakan sebagai berikut :

Gambar 1.  
Kerangka Pikir



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai September 2007, dimana lokasi penelitian ini berada pada tempat pengembangan dan pembangunan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang di Kabupaten Luwu.

#### **B. Teknik Pengambilan dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah masyarakat lokal berdiam di sekitar kawasan hutan Desa Ilan Batu Uru di Kecamatan Walenrang. Dari Kecamatan tersebut ditentukan satu desa secara sengaja dengan pertimbangan paling dekat berdiam pada kawasan pembangunan hutan kemasyarakatan.

##### **2. Sampel**

Sebelum menentukan besar sampel masyarakat, maka terlebih dahulu dilakukan sampel wilayah yang ditentukan secara sengaja, yaitu kecamatan yang dianggap memiliki petani lahan kering yang paling besar jumlahnya dan memiliki areal hutan yang paling besar dibanding Kecamatan lain di Kabupaten Luwu. Penentuan besarnya sampel ditetapkan secara metode purposive dengan menetapkan 60 KK yang berdiam disekitar kawasan hutan kemasyarakatan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik :

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada lingkungan masyarakat masyarakat petani untuk mengetahui tingkat partisipasinya dalam pembangunan sektor kehutanan.
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai hal-hal atau data yang diperlukan sesuai dengan variabel yang diteliti.
3. Metode kuesioner, yang merupakan pedoman atau petunjuk dari metode wawancara, karena metode ini merupakan sejumlah daftar pertanyaan terstruktur sesuai dengan variable yang diteliti.

Data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari data keadaan umum daerah penelitian. Data ini dihimpun dari berbagai instansi seperti BPS, Kantor Kecamatan pada setiap sampel penelitian, dan Kantor Dinas Kehutanan.

### **D. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah : Analisa deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data hasil penelitian lapangan khususnya dari kuesioner yang menggambarkan tentang keadaan umum lokasi penelitian terhadap keterlibatan

masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.

### E. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian dan kerangka pikir penelitian, definisi operasional variabel dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pembangunan hutan kemasyarakatan adalah proses kegiatan yang dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan manfaat hutan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, melalui pemberdayaan lahan di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan sehingga memberi hasil yang optimal kepada masyarakat. Pemanfaatan lahan dilakukan melalui perlindungan, perladangan, dan eksploitasi.
2. Keterlibatan masyarakat lokal adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat sesuai mekanisme proses politik dalam salah satu negara, turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan HKM yang dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi dan asumsi-sumnsi untuk masa yang akan datang untuk tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian

4. Pelaksanaan adalah proses perbaikan kualitas lahan agar lahan memberi kemanfaatan yang besar terhadap kemakmuran rakyat, melalui tindakan reboisasi, penghijauan, dan pengayaan tanaman.
5. Pemanfaatan adalah suatu proses kegiatan pemanfaatan hutan yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses tercapainya tujuan, dengan memperhatikan material, sosial dan personal..
6. Monitoring adalah pemantauan terhadap kegiatan dan aktivitas penduduk atau masyarakat lokal yang berdiam di luar dan di dalam kawasan hutan bertujuan untuk mengetahui kondisi dan keadaan hutan kemasyarakatan.
7. Pengendalian adalah mengandung arti suatu pekerjaan membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, peraturan, standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **BAB IV**

### **KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis**

Kecamatan Walenrang adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu. Kecamatan ini terletak di bagian utara Kabupaten Luwu sehingga sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan. Kecamatan Walenrang secara administratif dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lamasi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Palopo

Luas wilayah Kecamatan Walenrang adalah 259,26 km<sup>2</sup>, secara administratif pemerintahan kecamatan Walenrang terbagi menjadi 21 desa/kelurahan dengan jumlah dusun/ lingkungan sebanyak 96 buah. Rincian luas dari masing-masing desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Walenrang, dikemukakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Walenrang

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Tombang	24,63
2	Barammamase	10,77
3	Tabah	30,38
4	Lamasi Pantai	34,46
5	Seba-seba	2,04
6	Pompengan Pantai	26,92
7	Pompengan	15,12
8	Bulolondong	2,59
9	Kendekan	6,16
10	Suka damai	5,88
11	Rante damai	5,20
12	Pangali	4,70
13	Harapan	7,08
14	Tanete	13,08
15	Saragi	5,77
16	Bulo	6,36
17	Lalong	9,66
18	Walenrang	12,28
19	Batusilanduk	6,77
20	Ilan Batu	13,20
21	Ilan Batu Uru	16,20
Jumlah		259,26

Sumber : Kecamatan Walenrang Dalam Angka, Tahun 2007

Wilayah Kecamatan Walenrang dilintasi empat buah sungai yaitu sungai Lamasi dengan panjang 72 km, sungai Battang 31 km, sungai Poringan 18 km dan sungai Pangala dengan panjang 25 km. Oleh karena itu, wilayah ini produksi pertanian tumbuh cukup subur, karena selain curah hujan cukup juga daerahnya yang berada di ketinggian. Adapun jenis produksi yang potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di kecamatan Walenerang seperti : padi ladang, jagung, ubi jalar, ubi

kayu, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Jenis sayur-sayuran adalah kangkung, bayam, kacang panjang, lombok/cabe, ketimun, tomat dan terong.

### B. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kecamatan Walenrang tahun 2007 adalah 39.057 jiwa yang terdiri dari laki-laki 19.706 jiwa dan perempuan 19.351 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 7.798 KK. Lebih jelasnya dikemukakan pada Tabel 2.

Tabel 2. Banyaknya Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Walenrang Tahun 2007.

No	Desa / Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan per Km <sup>2</sup>
1	Tombang	322	1.738	71
2	Barammase	618	2.924	271
3	Tabah	503	2.508	260
4	Lamasi Pantai	280	1.626	124
5	Seba-seba	394	1.690	383
6	Pompengan Pantai	316	2.013	104
7	Pompengan	357	1.500	607
8	Bulolondong	253	1.517	114
9	Kendekan	265	1.765	124
10	Suka damai	345	1.861	249
11	Rante damai	398	1.401	396
12	Pangali	268	2.320	269
13	Harapan	497	2.320	365
14	Tanete	348	2.039	347
15	Saragi	220	1.128	436
16	Bulo	286	1.569	769
17	Lalong	522	2.752	446
18	Walenrang	300	1.674	62
19	Batusilanduk	424	2.016	133
20	Ilan Batu	445	2.203	73
21	Ilan Batu Uru	437	2.133	61
Jumlah		7.796	39.057	156

Sumber : Kecamatan Walenrang Dalam Angka, Tahun 2007



Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa desa/kelurahan yang terpadat di Kecamatan Walenrang adalah desa/Kelurahan Bulo, dengan kepadatan penduduk 769 jiwa per/km<sup>2</sup>. Adapun keadaan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Banyaknya Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Walenrang Tahun 2007

No	Desa/Kelurahan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tombang	842	896	1.738
2	Barammase	1.475	1.449	2.924
3	Tabah	1.247	1.261	2.508
4	Lamasi Pantai	827	799	1.626
5	Seba-seba	1.118	1.090	2.208
6	Pompengan Pantai	860	861	1.690
7	Pompengan	1.026	987	2.013
8	Bulolondong	798	702	1.500
9	Kendekan	751	766	1.517
10	Suka damai	904	861	1.765
11	Rante damai	941	920	1.801
12	Pangali	713	688	1.401
13	Harapan	1.168	1.152	2.320
14	Tanete	1.028	1.011	2.039
15	Saragi	560	568	1.128
16	Bulo	766	803	1.569
17	Lalong	1.353	1.399	2.752
18	Walenrang	796	878	1.674
19	Batusilanduk	1.013	1.003	2.016
20	Ilan Batu	1.221	982	2.203
21	Ilan Batu Uru	301	275	578
Jumlah		19.706	19.351	39.057

Sumber : Kecamatan Walenrang Dalam Angka, Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 3 tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar jumlahnya dibanding penduduk laki-laki.

Desa Ilan Batu Uru, adalah merupakan desa yang terletak di ujung Barat Kecamatan Walenrang. Dibanding desa/kelurahan lain, desa Ilan batu Uru belum semaju pembangunan prasarana fisiknya, karena selain letaknya yang terpencil desa ini juga sulit dijangkau oleh transportasi sehingga untuk mencapai lokasi desa, harus ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, meskipun desa ini memiliki potensi yang cukup besar baik di bidang pertanian maupun kehutanan namun belum mampu diberdayakan sepenuhnya kaena tidak didukung oleh sarana dan prasarana pembangunan fisik yang memadai.

### **C. Pola Penggunaan Lahan**

Dibanding desa/kelurahan lain yang ada di Kecamatan Walenrang, Wilayah Desa Ilan Batu Uru adalah yang paling kecil. Lahan sawah yang saat ini digarap oleh petani seluas : 61.00 ha, sedangkan lahan kering yang belum tersentuh oleh masyarakat setempat cukup luas yaitu 3.385 ha yang merupakan lahan kering terluas yang ada di Kecamatan Walenrang.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa salah satu penyebab sehingga lahan kering yang ada di Desa Ilan Batu Uru cukup luas adalah karena desa ini belum tersentuh oleh pembinaan secara rutin dari pihak terkait sehingga kegiatan merambah jalan terus, sedangkan di desa / Kelurahan lainnya pembinaan lebih intensif dan terjangkau. Masyarakat yang ada di Desa Ilan Batu Uru hanya mengandalkan sawah tadah hujan sehingga kurang produktif meskipun kondisi alamnya sangat mendukung.

Lahan kering di Desa Ilan Batu Uru dimanfaatkan oleh masyarakat masing-masing untuk:

- a. Bangunan pekarangan seluas 101, 04 ha
- b. Kebun/tegal seluas 110.04 ha.
- c. Ladang/Huma seluas 48 ha
- d. Hutan 55 ha.
- e. Lainnya 204.31 ha

#### **D. Gambaran Pelaksanaan HKm**

Sejak tahun 1995/1996 program pembangunan dan pelestarian HKm sudah dilaksanakan di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang, namun karena beberapa faktor akhirnya program ini belum sepenuhnya mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena program yang dilaksanakan belum dikelola dengan sungguh-sungguh oleh Dinas Kehutanan dan masyarakat, selain itu faktor dana dan penyediaan bibit juga menjadi kendala sehingga pengelolaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk saat ini, lokasi HKm yang dianggap masih produktif meskipun masih dipantau oleh pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan namun untuk pelaksanaannya terlihat belum optimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat menginginkan untuk menangani lokasi HKm tersebut agar dapat melestarikan sisa HKm yang masih dianggap produktif dan dapat menghasilkan bagi masyarakat lokal sekitar lokasi HKm. Meskipun demikian keinginan masyarakat tersebut belum dapat diwujudkan karena pemerintah daerah merasa masih mampu mengembangkan lokasi HKm tersebut

melalui dana yang disediakan pemerintah lewat Departemen Kehutanan Pusat dan Provinsi sesuai dengan program yang sudah disusun. Dana yang tersedia

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan HKm Desa Ilan Batu Uru, dimulai pada tahun 1995 seluas 50 ha dengan melibatkan 25 orang petani. Dari 50 ha luas hutan yang ada di Desa Ilan Batu Uru, 2 ha adalah merupakan lokasi HKm.

Jenis-jenis kegiatan pada kegiatan HKm adalah :

- a. Persiapan lapangan meliputi : pembuatan rancangan, pendaftaran peserta proyek HKm dan pembuatan ajir.
- b. Penanaman meliputi : pembuatan piring tanaman, pembuatan lubang tanam, penanaman bibit durian (10 m x 10 m), rambutan (6 m x 8 m), kopi (3 m x 3 m), nangka (6 m x 8 m), cabe / lombok dan jahe yang ditanam di sela-sela tanaman pokok.
- c. Pemeliharaan tahun berjalan meliputi : pendangiran, penyiangan dan penyulaman
- d. Monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, diketahui bahwa selain jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan dan dikembangkan masyarakat lokal tersebut di atas, umumnya telah ditanam pada lahan kebun dan ladang masyarakat yang seperti kentang, kubis, wortel dan sayur-sayuran lainnya. Pada areal ladang dan kebun / hutan rakyat, masyarakat terlihat mulai menerapkan pola-pola agroforestry dalam skala kecil.

Pada tahun pertama pelaksanaan HKM (tahun 1997) tingkat keberhasilan sesuai hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim dari Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (SBRLKT) Saddang menunjukkan bahwa hasil dari penilaian mencapai 30,5 %, sedangkan standar keberhasilan untuk mendapat bantuan pemeliharaan adalah > 35 persen. Ini menunjukkan bahwa sejak tahun pertama pelaksanaan HKM di Desa Ilan Batu Uru telah mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu :

- a. Jenis tanaman Pengelolaan Hutan dan Lahan ditanam saat musim kemarau (waktu tanam kurang sesuai).
- b. Masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- c. Jenis tanaman yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga masyarakat menebang dan menggantinya dengan jenis tanaman yang lain yang hasilnya lebih bisa dinikmati atau dijual.
- d. Adanya gangguan ternak yang berkeliaran di sekitar lokasi HKM.
- e. Jarak angkut bibit dari lokasi persemaian ke lokasi penanaman yang jauh, mengakibatkan sebagian besar bibit mati dalam perjalanan.

Sedangkan sebagian kecil dari budidaya tanaman yang berhasil disebabkan karena :

- a. Penanaman tanaman saat kegiatan Pengelolaan Hutan dan Lahan tepat pada musim hujan.
- b. Mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait.

- c. Bibit yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat, dan
- d. Kegiatan Pengelolaan Hutan dan Lahan ada pada lahan milik penduduk bukan pada areal perambahan penduduk.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada dasarnya ada keinginan masyarakat untuk membangun pengadaan kebun bibit desa dalam kegiatan pengelolaan hutan dan lahan. Meskipun demikian dirasakan pula pengadaan bibit yang dilakukan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat secara tepat masih perlu dilakukan. Adanya kendala-kendala seperti dikemukakan di atas, menyebabkan hingga saat diadakan penelitian pengelolaan HKM di Desa Ilan Batu Uru belum sepenuhnya mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan HKM dan memberi peningkatan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar pengelolaan HKM.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Keterlibatan dalam Perencanaan

Salah satu kegiatan yang dapat mempengaruhi pembangunan HKm di Kecamatan Walenrang khususnya di Desa Ilan Batu Uru adalah pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses pelibatan masyarakat dalam perencanaan masih kurang dilaksanakan, khususnya dalam hal : (1) penyampaian ide dan pikiran; (2) penyusunan program, dan (3) pengambilan keputusan. Mekanisme perencanaan yang kurang melibatkan masyarakat di Kecamatan Walenrang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan HKm di Desa Ilan Batu Uru belum berhasil melestarikan HKm secara optimal.

Hasil questioner yang diedarkan diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyampaian ide dan pikiran menyangkut program yang hendak dilaksanakan masih rendah. Dari penelitian yang dilakukan dan wawancara dengan sejumlah masyarakat diketahui bahwa mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana proses perencanaan dilaksanakan karena mereka tidak pernah dilibatkan atau diberitahu oleh aparat setempat.

Wawancara dengan Songe (43 Tahun) salah seorang tokoh masyarakat di Desa Ilan Batu Uru Yang memahami mengenai proses pengembangan HKm menyatakan bahwa :

*“secara umum masyarakat tidak memahcmi mengenai perencanaan pembangunan HKm, khususnya di Desa Ilan Batu Uru. Hal ini karena program pengembangan maupun langkah pengelolaan hutan kemasyarakatan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat di dalam perencanaan. Selain itu, tidak diadakan sosialisasi yang memadai mengenai kebijakan pengembangan hutan kemasyarakatan”*

Penyusunan program pelaksanaan pengembangan HKm di Kecamatan Walenrang keterlibatan masyarakat masih rendah sehingga program-program yang dilaksanakan selama ini belum atau tidak mencerminkan kondisi dan keinginan masyarakat lokal di daerah sekitar hutan.

Adapun penyusunan program pembangunan hutan kemasyarakatan pada Dinas Kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat disekitar hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang karena program yang bersangkutan sifatnya sangat teknis, seperti :

- a. Pembuatan rencana program inventarisasi dan identifikasi lahan kritis dalam dan luar hutan.
- b. Pembuatan rencana kegiatan pengembangan hutan kemasyarakatan 5 tahun.
- c. Pembuatan rencana kegiatan reboisasi.
- d. Pembuatan rencana kegiatan penghijauan
- e. Pembuatan rencana aneka usaha kehutanan.
- f. Pembuatan rencana sistem pengembangan usaha kelembagaan
- g. Pembuatan rencana pengembangan sumberdaya ekonomi.



- h. Pembuatan rencana program teknik pengembangan sumberdaya manusia
- i. Pembuatan rencana program teknik pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan HKm.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain program yang sifatnya teknis, maka terdapat program pengembangan dan pembangunan HKm yang perlu dikembangkan di Kecamatan Walenrang, dimana langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehingga seharusnya masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyusunan program tersebut. Penyusunan program dimaksud adalah rencana program partisipatif yang memuat program:

- a. Rencana kelola lokasi hutan
- b. Rencana kelola kelembagaan
- c. Rencana kelola usaha.

Tanggapan responden dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih kurang dilaksanakan secara efektif dan efisien, padahal seharusnya dalam beberapa hal khususnya perencanaan dan pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat perlu dilakukan.

## **2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan pembangunan HKm, tiga faktor yang harus diperhatikan adalah : (a) sumber daya lahan dan masyarakat; (b) usaha administrasi; (c) koordinasi. Ketiga jenis kegiatan tersebut adalah merupakan mekanisme pelaksanaan

pembangunan HKm yang perlu secara langsung melibatkan masyarakat sehingga mendukung keberhasilannya.

Dari wawancara dengan Sawada (47 tahun) salah satu anggota masyarakat yang berdiam disekitar lokasi hutan diketahui bahwa :

*“Identifikasi sumber-sumber berupa lahan dalam pelaksanaan pembangunan lokasi HKm di Desa Ilan Batu Uru sangat jarang bahkan dalam satu tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan. Yang dilaksanakan aparat adalah apabila kegiatan sudah dilaksanakan biasanya dilakukan pendataan terhadap sumber-sumber masyarakat disekitar hutan”*

Tindakan identifikasi terhadap sumber-sumber potensi dalam masyarakat tidak dilaksanakan secara terencana sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan HKM di Kecamatan Walenrang, tidak dapat diharapkan keterlibatan masyarakat sepenuhnya karena tidak diketahui kondisi masyarakat dan kemampuan masyarakat sekitar hutan agar dapat mendukung seluruh kegiatan yang sudah direncanakan.

Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa kegiatan pencadangan sudah dilaksanakan namun belum optimal. Hal tersebut tergambar dari kondisi areal persiapan untuk pembangunan dan pengembangan lokasi HKm di Desa Ilan Batu Uru, di mana penataan lokasi tidak jelas baik lokasi di dalam areal hutan maupun lokasi di luar areal lokasi hutan.

Mengkonfirmasi hal tersebut, dilakukan wawancara dengan Suleman (51 th) salah seorang warga masyarakat yang ikut aktif terlibat di dalam kegiatan pencadangan, bahwa :

*"Masyarakat di Desa Ilan Batu Uru rendah keterlibatannya di dalam kegiatan pencadangan untuk penentuan lokasi pembangunan, baik di dalam maupun di luar hutan. Hal ini disebabkan karena aparat dalam pelaksanaan pencadangan tidak terlalu memperhatikan aspirasi masyarakat dalam menentukan lokasi yang tepat untuk kegiatannya sehingga masyarakat merasa tidak sesuai dengan kondisi sehari-hari mereka bahkan menurut mereka penentuan lokasi tersebut memberi pengaruh yang buruk terhadap kondisi ekonomi dan mata pencahariannya".*

Setelah kegiatan pencadangan dilakukan, maka kegiatan selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan hutan HKm adalah kegiatan inventarisasi. Di Kecamatan Walenrang kegiatan inventarisasi masih kurang, padahal pembangunan HKm Kecamatan Walenrang dapat benar-benar memberi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar lokasi hutan. Kegiatan inventarisasi terhadap potensi sumberdaya hutan, sumberdaya manusia, teknologi lokal serta kelembagaan dan permodalan penting dilaksanakan agar upaya pengembangan dan pembangunan HKm di daerah ini memberi kontribusi terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi HKm.

Penanganan pembangunan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang diperlukan hal penggunaan sarana dan prasarana yang memadai, ini ditandai bahwa kurangnya usaha-usaha administrasi pendukung yang dijumpai. Usaha administrasi yang dimaksud adalah berupa penyusunan rancangana teknik pelaksanaan yang merupakan dokumen yang dihasilkan melalui serangkaian kegiatan dan proses penyusunan rancangan yang dilakukan secara partisipatif oleh semua unsur yang

sudah dikemukakan yang merupakan peta komitmen para pihak berkepentingan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, LSM sebagai tim fasilitator.

Dari Wawancara dengan Koppeng (55 tahun) salah seorang anggota masyarakat di Desa Ilan Batu Uru mengungkapkan bahwa :

*“Tim fasilitator sama sekali tidak melibatkan anggota masyarakat didalam menyusun rancangan pelaksanaan pembangunan HKm. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitator adalah mensosialisasikan rancangan pelaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, sehingga masyarakat tinggal menerima rancangan tersebut meskipun pada dasarnya sangat tidak sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat untuk mengembangkan lokasi HKm di desanya”.*

Dalam hal pelaksanaan pembangunan hutan kemasyarakatan yang perlu diperhatikan di Kecamatan Walenrang yaitu Koordinasi dengan anggota masyarakat adalah meliputi :

- a. Koordinasi penetapan lahan/wilayah kerja
- b. Koordinasi penetapan jenis komoditas
- c. Koordinasi teknis pelaksanaan

Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam koodinasi pelaksanaan teknis pembangunan HKm belum dilaksanakan dengan baik. karena pada dasarnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi dan situasi HKm di daerahnya. Aparat dalam kegiatan ini hanya memahami dan mengetahui kondisi dari laporan yang diperoleh. Oleh karena itu, tanpa melibatkan masyarakat

tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam rangka pembangunan kehutanan tidak akan dapat diwujudkan dengan baik dan efektif apabila keterlibatan masyarakat rendah. Demikian pula dalam kerangka teknis pelaksanaan di lapangan, meskipun secara aparat dipandang memiliki kemampuan teknis yang cukup, namun dilihat dari pengalaman masyarakat lebih unggul karena secara langsung berkecimpung di dalam teknis pelaksanaannya meskipun dilakukan secara alami.

### **3. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan**

Pembangunan lokasi hutan kemasyarakatan bertujuan agar seluruh kegiatan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna. Oleh karena itu dalam kerangka pemanfaatan hasil-hasil pembangunan HKM yang perlu diperhatikan adalah dalam bentuk : (a) Material; (b) Sosial; (c) Personal.

Untuk pelaksanaan pembangunan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang kegiatan pengembangan dilakukan di kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan lokasi dilakukan berupa :

- a. Budidaya tanaman rotan
- b. Budidaya tanaman obat
- c. Budidaya tanaman pangan
- d. Budidaya perlebahan
- e. Budidaya tanaman kayu-kayuan

Penelitian yang diadakan, diketahui bahwa untuk proses pembudidayaan di lokasi HKM di Desa Ilan Batu Uru, telah ditetapkan 5 Jenis Pembudidayaan yang sesuai dengan kondisi alam maupun kondisi masyarakat bersangkutan, namun saat ini

yang berjalan efektif hanya pembudidayaan tanaman pangan dan pelebahan. Kedua Jenis pembudayaan tersebut juga Tidak berjalan seperti yang diinginkan karena ketersediaan material yang sangat kurang.

Wawancara dengan Matta Abba (44 Tahun) Salah seorang warga masyarakat di Desa Ilan Batu Uru terungkap bahwa

*“Untuk pemanfaatan di lokasi HKm telah ditetapkan sejumlah kegiatan budidaya seperti Jamur, Tanaman obat, tanaman pangan dan hias serta pelebahan. Sejak dilaksanakan, Material yang disediakan selalu tidak cukup bahkan terkesan apa adanya sehingga masyarakat tidak dapat melaksanakan kegiatan pembudidayaan dengan baik sesuai rencana yang sudah disusun. Bahkan ada beberapa pembudidayaan yang gagal untuk dilaksanakan karena material yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat”.*

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa untuk meningkatkan kondisi sosial Masyarakat di Desa Ilan Batu Uru, pembangunan lokasi HKm dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu :

- a. Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu
- b. Usaha Pemanfaatan hasil hutan non kayu

Usaha pemanfaatan Hasil hutan non kayu yang dikembangkan saat ini di Kecamatan Walenrang pada dasarnya belum menghasilkan sesuai yang diharapkan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang, keterlibatan masyarakat di dalam pemanfaatan dan pembangunan HKm masih rendah sehingga nampak tidak semua masyarakat yang ada terlibat didalam

kegiatan tersebut. Kenyataan ini tentu memperlihatkan bahwa sosialisasi dan cara kerja aparat dalam rangka pembangunan HKM di desa ini kurang efektif sehingga perlu diupayakan untuk lebih meningkatkan keterlibatan di dalam kerangka kerja yang lebih jelas, meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Usaha-usaha tersebut sampai saat diadakan penelitian tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hanya merupakan rencana yang tidak dapat direalisasikan dengan baik dan tidak memberi kemanfaatan yang besar kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Walenrang.

Bentuk-bentuk yang cocok dikembangkan dalam pengembangan usaha masyarakat Kecamatan Walenrang seiring keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan hutan kemasyarakatan yaitu :

1. Pengembangan SDM berupa :
  - a. Peningkatan kesadaran dan percaya diri
  - b. Peningkatan keterampilan
  - c. Peningkatan kesejahteraan
  - d. Peningkatan pendapatan
2. Pengembangan Kemampuan Dalam Permodalan, berupa :
  - a. Bantuan Cuma-Cuma
  - b. Bantuan bergulir
  - c. Kredit subsidi
  - d. Kredit komersial

#### **4. Keterlibatan Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan HKm dilaksanakan secara berkala dan teratur dengan melibatkan para pelaku seperti masyarakat dan aparat. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan dan setiap masalah yang dijumpai dalam pelaksanaannya dapat diketahui secara dini dan dapat dipecahkan dengan mudah.

Penelitian yang dilaksanakan diketahui bahwa kegiatan monitoring terhadap kegiatan masyarakat disekitar lokasi HKm di Desa Ilan Batu Uru belum dilaksanakan secara seksama. Monitoring yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 minggu sekali seperti yang direncanakan dilakukan 1 bulan sekali bahkan menurut keterangan masyarakat dilakukan 2 bulan sekali. Pelaksanaan monitoring tersebut pada akhirnya tidak mampu memantau kemajuan dan kegiatan yang dilaksanakan Oleh masyarakat bnaik kegiatan usaha maupun kegiatan kelembagaan yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan lokasi HKm.



## B. Pembahasan

Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang dapat terlaksana dengan baik dengan mempertimbangkan beberapa faktor :

- a. Masyarakat meskipun di bidang pengetahuan formal kurang memahami mengenai HKm, namun secara teknis mereka lebih mengetahui kondisi dan situasi HKm di desanya.
- b. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program diharapkan akan dapat mempengaruhi kebijakan yang selama ini sangat kaku, karena kurang mempertimbangkan kondisi masyarakat di sekitar lokasi HKm.
- c. Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan program pengembangan bidang kehutanan akan dapat memacu pelibatan masyarakat di lapangan untuk mengupayakan pemeliharaan dan pembangunan HKm.

Pengelolaan dan pembangunan HKm sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, seharusnya diarahkan pada seluruh potensi sumberdaya hutan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan pada HKm dipertimbangkan agar memberi kesempatan kepada masyarakat di Kecamatan Walenrang menjadi pelaku atau mitra usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

Dari Hasil yang diperoleh pada tahapan konsep yang ada di pengembangan hutan kemasyarakatan Kecamatan Walenrang masih perlu dikembangkan prinsip-

prinsip manfaat dan lestari, berkelanjutan dan bertahap serta spesifik lokal yang ada. Hal ini karena masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, baik berupa penyampaian ide dan pikiran, penyusunan program dan pengambilan keputusan.

Pelaksanaan dan pemanfaatan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang dapat berjalan baik atau terimplementasikan sesuai tujuan apabila dikordinasikan dengan masyarakat setempat berupa aspek produksi, budaya, kebutuhan dan pengoptimalan aspirasi masyarakat sepenuhnya, sehingga dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## **VI. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang berupa bentuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Monitoring dan Evaluasi tidak berjalan baik dikarenakan perubahan tidak mengarah kepada keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan hutan dan pengembangannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Walenrang, karena faktor yang berpengaruh berupa pengendalian pelaksanaan pembangunan HKM yang belum dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah daerah setempat.

### **B. Saran**

Adapun Saran dalam penelitian ini adalah mengoptimalkan kerja aparatur Dinas Kehutanan bersosialisasi dengan masyarakat setempat dalam mengupayakan keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, 1992. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan HKM*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1976. *Dasar-dasar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bryant dan White, 1987. *Management Development Third Work*, Gramedia, Jakarta.
- Cohen dan Uphoff, 1997. *Pengambilan Keputusan Strategik*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamalik, 1993. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Haji Masagung, Jakarta.
- Jahi, 1988. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek Sosialogi, Ekonomi dan Perencanaan*. Liberty, Yogyakarta.
- Kartasasmita, 1996. *Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Laloasa, 2001. *Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Unaha, Kendari*, Tesis Sarjana UNHAS Makassar.
- Lei dan Sheng, 1993. *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*, LP3ES, Jakarta.
- Leuhery, 1989. *Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*, Pustaka Buana, Bandung.
- Komorotomo, Wahjudi. 1991. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI Press, Jakarta.
- Made Fidarta, I, 1997. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*, Reneka Cipta, Bandung.
- Mikkelsen, Birta, 2000. *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mishra dan Slamet. 1984. *Konsepsi dan Implikasi Penerapan Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Indonesia*, Jurnal PWK ITB, Bandung.

- Moekijat, 2000. *Administrasi Kepegawaian*, Haji Masagung, Jakarta.
- Muthalib, 1993. *Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan*, Yayasan Akatiga, Bandung.
- Ndraha Talisindhuru, 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nitisemito Alex, 1982. *Strategi Pembangunan Masyarakat Bertumpuh Pada Kelompok*, LP3ES, Jakarta.
- Noronha, 1982. *Sosial Forestry*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Nugroho, 2003. *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- Panglaykim dan Hazil, 1977. *Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prayudi, Atmosudirdjo, 1990. *Pengambilan Keputusan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rukmana Nana D.W, 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, LP3ES, Jakarta.
- Sarbidi, 1999. *Perilaku Partisipasi Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Singarimbun Masri dan Effendy Sofyan, 1989. *Metodologi Penelitian Survey*. Edisi Revisi, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Soedjadi, F. X, 1989, *Analisis Manajemen Modern*, Haji Masagung, Jakarta.
- Soedrajat, 1995. *Sistem Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Soekanto, 1986. *Analisis Manajemen Modern*, Haji Masagung, Jakarta.
- Stephen P.Robbins, 1992. *Pengantar Manajemen (Terjemahan)*, Gramedia, Jakarta.
- Sumadhijo, Brotohadji, 1997. *Hutan Kemasyarakatan Sebagai Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tradisional Dalam Pengelolaan Hutan*, Seminar Sehari Hasil-hasil Penelitian Kehutanan Masyarakat Tanggal 4 Nopember 1997 : Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Supritana, T. S. U, 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sutrisno, 2002. *Pembangunan Hutan Kemasyarakatan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Suwignjo, 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tikson Deddy, 2001. *Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Perkotaan*, Makalah disajikan dalam Lokakarya PPIS Tanggal 4-9 Juni 2001 di Makassar.
- Tjokrowinito, M, 1993. *Pembangunan Kehutanan Yang Berwawasan Jender*, Seminar Sehari Analisis Jender, Tanggal 18 Januari 1993 oleh Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Todaro, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Westra, Parieta, 1983. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Yunus dan Alam, 2001. *Prinsip-prinsip Pembangunan Hutan Kemasyarakatan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Zain. M, 1997. *Sejarah Perkembangan Hutan Kemasyarakatan*, LP3ES, Jakarta.

## KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) beberapa pertanyaan (angket) yang dimaksudkan untuk mengetahui pembangunan Hutan Kemasyarakatan. Untuk itu, mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr(i) dapat meluangkan waktu guna memberikan jawaban (mengisi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya) dengan cara memberi tanda (X) pada salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan.

JAWABAN ANDA BERSIFAT RAHASIA DAN TIDAK AKAN BERDAMPAK  
NEGATIF TERHADAP DIRI ANDA

**A. IDENTITAS :**

**RESPONDEN**

Nomor Responden : .....(diisi oleh peneliti)

Jenis Kelamin : .....

Latar Belakang : .....

Pendidikan

Pangkat/Golongan : .....

Masa Kerja : .....

Unit Kerja : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

## B. PERTANYAAN

1. Apakah menurut saudara, masyarakat sudah dilibatkan di dalam perencanaan untuk menyampaikan ide dan pikiran?

- Dilibatkan  Tidak terlibat  
 Kurang terlibat

2. Apakah menurut saudara, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan program perencanaan pembangunan HKm?

- Terlibat  Tidak terlibat  
 Kurang terlibat

3. Apakah menurut saudara, masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan?

- Terlibat  Tidak terlibat  
 Kurang terlibat

4. Apakah selama ini aparat sudah mengidentifikasi sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat?

- Dilakukan  Tidak dilakukan  
 Kurang dilakukan

5. Apakah menurut saudara, masyarakat sudah dilibatkan di dalam kegiatan pencadangan pembangunan lokasi HKm?

- Terlibat  Tidak terlibat  
 Kurang terlibat

6. Apakah menurut saudara, telah dilakukan kegiatan inventarisasi potensi di Kabupaten Luwu?



- Dilaksanakan
- Tidak dilaksanakan
- Kurang dilaksanakan

7. Apakah menurut saudara, dalam pengelolaan HKm sudah dibentuk tim fasilitator?

- Dibentuk
- Tidak dibentuk
- Kurang dibentuk

8. Apakah menurut saudara, masyarakat sudah dilibatkan di dalam menyusun rancangan administrasi pembangunan HKm?

- Terlibat
- Tidak terlibat
- Kurang terlibat

9. Apakah menurut saudara, telah dikoordinasikan areal pembanguan HKM dengan masyarakat?

- Dikoordnasikan
- Tidak dikoordinasikan
- Kurang dikoordinasikan

10. Apakah menurut saudara, telah terjalin koordinasi antara masyarakat dengan aparat dalam pemilihan komoditas guna rehabilitasi lahan dalam pembangunan HKm?

- Dikoordinasikan
- Tidak dikoordinasikan
- Kurang dikoordinasikan

11. Apakah menurut saudara, sudah terjalin dikoordinasi antara aparat dengan masyarakat dalam pelaksanaan teknis pembangunan HKm?

- Dikoordinasikan
- Tidak dikoordinasikan
- Kurang dikoordinasikan

12. Bagaimana menurut saudara, pelaksanaan pengawasan kelola kawasan?

- Dilakukan
- Tidak dilakukan
- Kurang dilakukan

13. bagaimana menurut saudara, pengawasan terhadap kelola kelembagaan?

- Dilakukan
- Tidak dilakukan
- Kurang dilakukan

14. Apakah menurut saudara, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan kelola usaha masyarakat?

- Dilakukan
- Tidak dilakukan
- Kurang dilakukan

15. Apakah menurut saudara, pendapatan masyarakat meningkat dalam pengelolaan HKm?

- Meningkatkan
- Tidak meningkat
- Kurang meningkat

16. Apakah menurut saudara, selama ini masyarakat memperoleh bantuan berupa pemasaran hasil produksi?

- Dibantu
- Tidak dibantu
- Kurang dibantu

17. Apakah menurut saudara, penyediaan material sudah cukup di dalalam pengelolaan HKm?

- Cukup
- Tidak cukup

Kurang cukup

18. Apakah menurut saudara, penyediaan material sudah tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan?

tepat waktu

Tidak tepat waktu

Kurang tepat waktu

19. Apakah menurut saudara, hasil yang dirasakan oleh masyarakat sudah cukup didalam pengelolaan HKm?

Cukup

Tidak cukup

Kurang cukup

20. Apakah menurut saudara, pendapatan masyarakat meningkat dari sektor pengelolaan hasil hutan?

Meningkat

Tidak meningkat

Cukup meningkat

21. Apakah menurut saudara, penerimaan pendapatan hasil hutan sudah sesuai dengan potensi?

Sesuai

Tidak sesuai

Kurang sesuai

22. Bagaimana menurut saudara, kontribusi pengelolaan hasil hutan terhadap PAD?

Tinggi

Rendah

Kurang